

**ANALISIS BELANJA MODAL DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN  
ANGGARAN (SILPA) DALAM LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN (LRA) PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : SURYANI FAJRIN  
Npm : 1405170707  
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:


**MEMUTUSKAN**

Nama : SURYANI FAJRIN  
N P M : 1405170707  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS BELANJA MODAL DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

  
ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Penguji II

  
IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si

Pembimbing

  
ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua



  
P. P. PURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

  
ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : SURYANI FAJRIN  
N.P.M : 1405170707  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Judul Penelitian : ANALISIS BELANJA MODAL DAN SISA LEBIH  
PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DALAM LAPORAN  
REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

ELIZAR SINAMBELA SE, M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



H. JANURI, SE., MM., M.Si

## **ABSTRAK**

**SURYANI FAJRN, NPM : 1405170707. Analisis Belanja Modal Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Skripsi, tahun 2018.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis belanja modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif.

Dari analisis data pada pembahasan maka dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan kurang baik. Karena pemerintah belum memanfaatkan APBD dengan baik khususnya dalam Belanja Daerah. Pemerintah juga belum tepat dalam menyajikan APBD sehingga SILPA semakin besar dan kriteria efiseinsi belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan tidak efisien karena rasionya lebih dari 100%. Namun realisasi belanja nya tidak pernah melebihi yang dianggarkan.

**Kata Kunci : Belanja Modal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Departemen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Manfaat dari penelitian adalah menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Pada kesempatan yang baik ini pula, penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Mila Sari atas curahan seluruh cinta dan kasih sayang serta untaian doa yang tiada henti yang sampai kapan pun penulis tidak akan bisa membalasnya. Ayahanda Saiful Irwan (Alm) yang tidak sempat melihat ananda meraih gelar sarjana atas semua nasihat, kasih sayang, serta curahan keringat dan pengorbanannya yang ikhlas tanpa pamrih dalam membesarkan penulis. Maafkan jika ananda sering menyusahkan, merepotkan, dan melukai perasaan ibunda dan ayahanda. Semoga Allah Subhanahu WaTa'ala selalu menerangi jalanmu dan memberikan keselamatan dunia akhirat, Amin. Juga kepada Abang penulis Wahyu Hidayat,ST yang tiada hentinya memberikan dorongan positif, masukan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini.

Penulisan skripsi ini juga tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa doa, bimbingan, pengarahan, bantuan, kerja sama semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak.

1. Bapak Dr..Agus Sani, M.A.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H.Januri, SE.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE.,M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitri Saragih, SE.,M.Si., selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE.,M.Si., selaku sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela, SE.,M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu staff Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yang telah memberikan izin dan telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk penulis.
8. Sahabat-sahabat penulis Sri Hartina, Iskandar, Bulan Sari Nst, Ira Herliani yang saling memotivasi dan saling mendoakan.

9. Teman-teman sekelas di Akuntansi E Siang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah saling memotivasi dan saling menguatkan satu sama lainnya.
10. Semua pihak tanpa terkecuali yang turut memberikan dorongan dan partisipasi sampai skripsi ini selesai.

Penulis sangat menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari harapan pembaca sebagaimana tulisan-tulisan ilmiah yang lainnya, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan pengetahuan yang terbatas penulis siap menerima saran dan kritik yang membangun. Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini bermanfaat. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Medan, Maret 2018

Penulis

SURYANI FAJRIN  
Npm 1405170707

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Uraian Teoritis.....	8
1. Keuangan Daerah.....	9
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	12
3. Belanja Modal.....	14
4. SILPA.....	17
5. Penelitian Terdahulu.....	20
B. Kerangka Berfikir.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	24
B. Definisi Operasional.....	24
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26



D. Jenis dan Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Hasil Penelitian.....	30
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	30
2. Deskripsi Data.....	31
3. Analisis Data.....	35
B. Pembahasan.....	40
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	27
Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara.....	29
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran.....	31
Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran.....	33
Tabel 4.3 Analisis Varians Belanja.....	36
Tabel 4.4 Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah.....	37
Tabel 4.5 Analisi Pembiayaan.....	38
Tabel 4.6 Rasio Efisiensi Belanja.....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laporan Realisasi Anggaran .....	4
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	23
Gambar 4.1 Belanja Modal.....	32
Gambar 4.2 SILPA.....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah dalam rangka menjalankan proses pemerintahan di daerah wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses penyusunan APBD dimulai dengan kedua belah pihak yaitu antara eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dari sisi keuangan Negara, kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal telah menimbulkan implikasi yang mendasar dalam peta pengelolaan fiskal..Pengoptimalan tersebut harus secara tegas dicantumkan dalam APBD sebagai salah satu media utama dalam perencanaan penerimaan dan pembiayaan pembangunan di daerah.Ini berarti pengalokasian anggaran publik harus lebih di peruntukan bagi kepentingan publik, misalnya dalam hal belanja modal.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Lebih lanjut menurut Syaiful (2006) Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya.

Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap belanja modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pengalokasian dana PAD ke dalam anggaran belanja modal dikarenakan dengan hal tersebut Pemda akan dapat membangun daerahnya menjadi lebih baik karena tersedianya sarana dan prasarana dari belanja modal yang dilakukan. Selain dari PAD dan transfer dari pusat, sumber lain yang dapat dimanfaatkan oleh Pemda untuk membiayai kegiatannya yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Kusnandar dan Siswantoro, 2012, dalam jurnal Resiana Sukmawati Vol 4 tahun 2014). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, SILPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode.

Pelampauan target SILPA yang bersumber dari pelampauan target penerimaan daerah dan efisiensi sangat diharapkan sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program/kegiatan pembangunan apalagi dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat. SILPA digunakan pula untuk

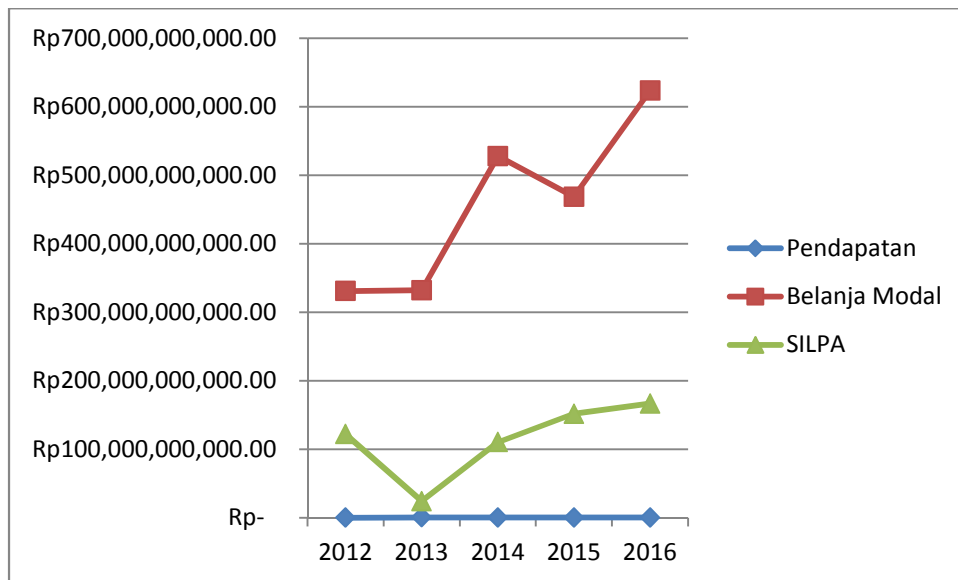
permasalahan krusial yang sebelumnya memang disetujui oleh pihak legislatif. SILPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif dibidang perencanaan dan pengelolaan dana. Sebagian besar SILPA digunakan belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Jumlah belanja langsung dapat berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan sebagainya (Ardhini, 2011).

Salah satu tugas penting dari pemerintahan daerah adalah menyediakan dan membangun infrastruktur publik melalui alokasi belanja modal pada APBD. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menunjukkan bahwa pengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam mendorong perekonomian daerah.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat

tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008).

Adapun data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di sajikan dalam bentuk statistik sebagai berikut :



**Gambar 1.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan**  
**Tahun 2012-2016**

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, terlihat bahwa Belanja Modal pada Tahun 2015 di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan mengalami penurunan. Hal ini akan menyebabkan menurunnya produktivitas masyarakat dan juga akan menyebabkan berkurangnya jumlah investor yang melakukan investasi yang akan mengurangi pendapatan asli daerah. Menurut Abimanyu (2005) apabila belanja modal meningkat maka akan berdampak pada produktivitas masyarakat yang semakin meningkat dan bertambahnya jumlah investor yang melakukan investasi akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pada Gambar 1.1 diatas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) setiap tahun semakin besar. Sementara menurut Tanjung (2009) bahwa kelebihan Sisa

Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang cukup besar dapat mengindikasikan bahwa pemerintah tidak tepat dalam menganggarkan anggaran belanja daerah sehingga seharusnya kelebihan penganggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan belanja modal yang berguna untuk penyediaan pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda.

Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi dua masalah di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yaitu Menurun nya Belanja Modal pada tahun 2015 dan setiap tahun semakin besar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Menurut Ida Metayani dan Rusmanto (2013) menyatakan bahwa semakin besar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) maka semakin besar pula Belanja Modal.

Tetapi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan pada tahun 2015 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) semakin besar namun Belanja Modalnya menurun.

Berdasarkan adanya ketidak sesuaian antara teori dan kenyataan,, maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi yaitu **“Analisis Belanja Modal Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis, penulis mengidentifikasi masalah yang akan menjadi pokok pikiran dan pembahasan adalah sebagai berikut :



1. Terjadinya penurunan Belanja Modal pada tahun 2015 di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan
2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) setiap tahun semakin besar.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Mengapa terjadinya Penurunan Belanja Modal Pada tahun 2015 ?
2. Mengapa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) semakin besar setiap tahunnya?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya Penurunan Belanja Modal Pada tahun 2015
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) setiap tahun semakin besar.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi pemerintahan, khususnya mengetahui bagaimana kondisi belanja modal jika sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) nya mengalami peningkatan atau penurunan pada pemerintahan daerah.

b. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan tambahan referensi dalam menganalisis belanja modal dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pemerintah daerah jika mengalami kenaikan ataupun penurunan.

c. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Sebagai bahan referensi dan bacaan untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan memberi masukan pada pengembangan akuntansi sektor publik

d. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan perbandingan yang berguna dalam menambah pengetahuan, khususnya yang berminat dengan pembahasan mengenai analisis belanja modal dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dalam laporan realisasi anggaran (LRA) Pemerintahan Daerah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Keuangan Daerah**

###### **1.1 Pengertian Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2004), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Mamesah (1995), keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Dari defenisi tersebut, selanjutnya Halim (2002) menyatakan terdapat 2 hal yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Yang dimaksud dengan hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkankekayaan daerah.
2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut Halim (2001:20) ada dua yaitu :

1. Keuangan daerah yang dikelola langsung, meliputi :
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD)
  - b. Barang-barang inventaris milik daerah
2. Kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi :
  - a. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Adapun arti dari keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut, Halim (2001:20).''Sedangkan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang

terdiridari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah.’’

Telah dijelaskan diatas bahwa keuangan daerah adalah pengorganisasian kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang di inginkan daerah tersebut, sedangkan akuntansi keuangan daerah sering diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistimatis dibidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedurprosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan.

## **1.2 Pengertian dan Unsur-unsur Anggaran dan Belanja Daerah**

Seperti halnya pada pemerintahan pusat, pada pemerintahan daerah, pengurusan keuangan daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus.Dengan demikian pada pemerintahan daerah terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pengurusan umum-nya dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus-nya. Bagian ini akan menjelaskan secara singkat APBD sebagai inti pengurusan umum keuangan daerah.

APBD berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tetang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefenisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1tahun anggaran tertentu, dan

pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Mamesah, 1995:20)

Definisi tersebut merupakan pengertian APBD pada orde baru. Sebelumnya, yaitu pada era orde lama, terdapat pula definisi APBD (Wajong,1962:81) menurutnya APBD adalah rencana pekerjaan keuangan (financial workplan) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu dalam waktu mana badan legislatif (APBD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepada daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (grondslag) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

APBD adalah suatu anggaran daerah. Kedua definisi APBD diatas menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah termasuk APBD memiliki unsure-unsur sebagai berikut :

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun

## **2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

### **2.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam suatu periode tertentu (salamun, 2007).

Standar Akuntansi Pemerintahan (2010: 70) menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut :

1. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para

pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Namun dari segi struktur, LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/ defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SiKPA), yang mana berdasar pada basis kas.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Manfaat Laporan Relisasi Anggaran yaitu untuk menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

### **3. Belanja Modal**

#### **a. Pengertian Belanja Modal**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Halim (2008:73) mendefinisikan Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan Abdullah (2013), Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap.

Sama pula dengan yang diungkapkan oleh Nordiawan (2006), bahwa Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu.

Adapun jenis - jenis belanja yang dapat dikategorikan kedalam lima kategori utama kegiatan belanja modal menurut Syaiful (2006), Menurut Perdirjen Perbendaharaan belanja modal dipergunakan untuk antara lain sebagai berikut :

a. Belanja Modal Tanah.

Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian atau pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang- barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku- buku dan jurnal ilmiah.

## **b. Kriteria Belanja Modal**

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

1. Aset tetap mempunyai ciri-ciri / karakteristik sebagai berikut : berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri / karakteristik Aset Lainnya adalah : tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.
2. Aset tetap mempunyai ciri-ciri / karakteristik sebagai berikut : berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri / karakteristik Aset Lainnya adalah : tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.

## **4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

### **a. Pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran..

Menurut Abdullah (2013), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006. Menurut Tanjung (2009), SILPA didefinisikan sebagai selisih antara surplus/defesit dengan pembiayaan neto.

Jika SILPA daerah cukup besar dan diperkirakan mampu membiayai seluruh Belanja Modal maka untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik tidak harus menunggu bantuan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Dana Transfer dapat dialokasikan untuk belanja operasional dan belanja tak terduga daerah. Disamping itu jumlah SILPA suatu daerah dapat juga mengindikasikan sejauh mana Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran daerah secara efisien dan ekonomis dalam setiap anggaran belanja daerah.

Menurut Tanjung (2009) bahwa kelebihan SILPA yang cukup besar dapat mengindikasikan bahwa pemerintah tidak tepat dalam menganggarkan anggaran belanja daerah sehingga seharusnya kelebihan penganggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan belanja modal yang berguna untuk penyediaan pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda.

Untuk dapat menjelaskan lebih lanjut SILPA ini datangnya darimana, maka diperlukan pengkajian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi overtarget dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Jika SILPA tersebut datangnya dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada pemerintah daerah, hal ini merupakan hal yang tidak menggembirakan

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal baik peralatan atau teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Barang/jasa tersebut dapat berupa perbaikan jalan umum yang rusak, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana lainnya yang dapat dinikmati masyarakat.

Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Misalnya dalam APBD terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar, ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 100 Miliar, maka SILPA-nya adalah Rp0, namun jika terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar dan ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 120 Miliar (SILPA Positif), yang berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan Rp 20 Miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. SILPA Positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah.

Jika angka SILPA-nya negatif berarti bahwa pembiayaan netto belum dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Untuk itu perlu dicari jalan keluarnya. Misalnya dengan mengusahakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain seperti pencairan dana cadangan, pinjaman dan lain

sebagainya, atau dengan mengurangi Belanja dan/atau mengurangi pengeluaran pembiayaan sehingga angka SILPA ini sama dengan nol.

## 5. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mendapat ide dan pengetahuan dari penelitian terdahulu yang beragam. Penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teknik Analisis	Hasil
1.	Grace Yunita Liando (skripsi, 2015)	Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Analisis Deskriptif	Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kinerja belanja PemKab Kepulauan Sangihe dinilai baik dan terus melakukan perbaikan setiap tahun dalam pemanfaatan realisasi belanja. Diharapkan pada tahun selanjutnya Pimpinan DPPKAD sebaiknya meninjau lebih jauh manfaat serta pengalokasian belanja daerah sehingga dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas dan efisiensi belanja di masa yang akan datang.

2.	Resiana Sukmawati (Skripsi, 2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten.	Analisis Kuantitatif	Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal secara simultan dengan sumbangan pengaruh sebesar 45%
3.	Palilingan (Skripsi, 2015)	Pengaruh Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Kota Manado	Analisis Deskriptif	Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Kinerja pendapatan dan pembiayaan pada Dinas Pendapatan Kota Manado sudah baik
4.	Makka (Skripsi, 2015)	Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu	Analisis Deskriptif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja belanja pada Dinas PPKAD Kota Kotamobagu dinilai sudah baik

## B. Kerangka Berfikir

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam suatu periode tertentu (salamun, 2007)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur yaitu, Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/defisit, Pembiayaan, Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

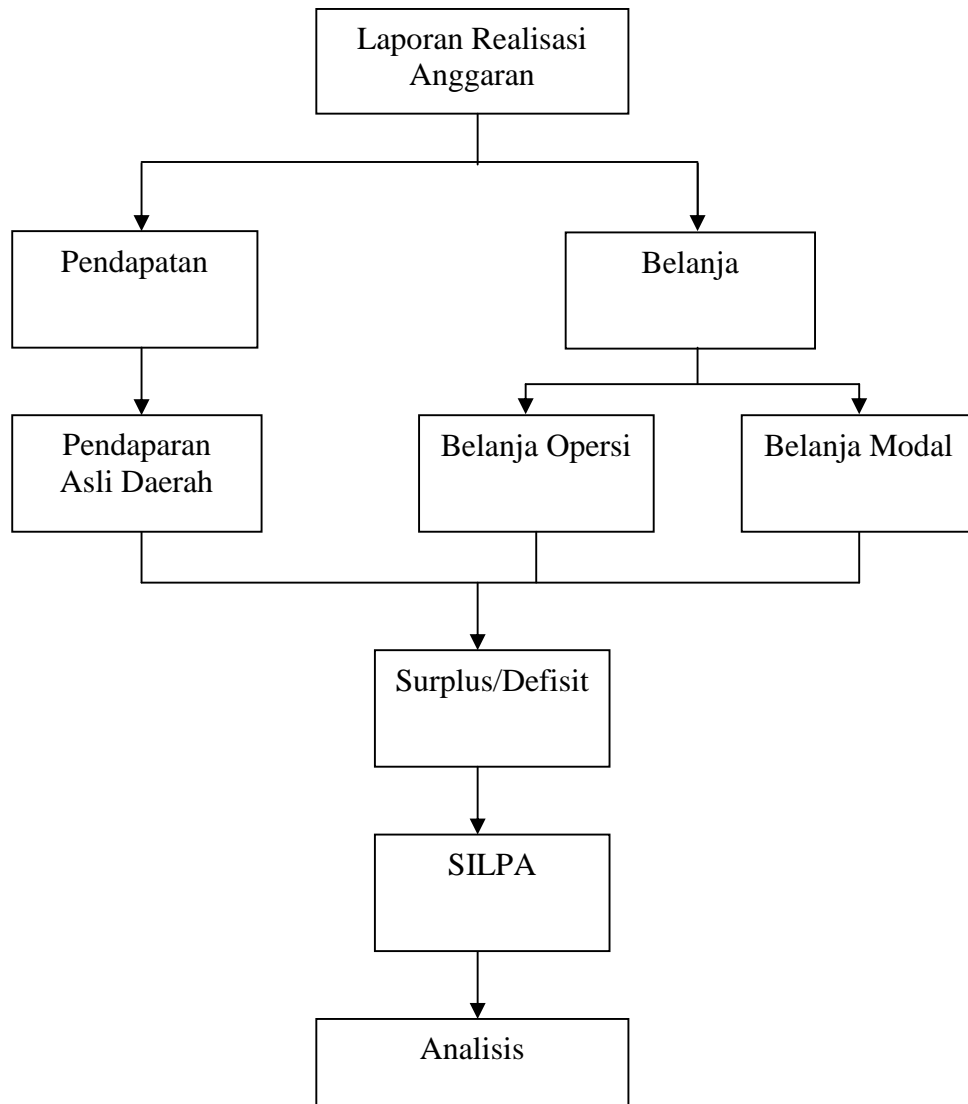


Indra Bastian (2012:146) menyatakan bahwa, Pendapatan Daerah adalah peningkatan harta dari satu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi pokok yang berkelanjutan dari kesatuan tersebut. Halim dan Kusufi (2012:96) mengelompokan pendapatan daerah menjadi 3, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:99), Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Halim dan Kusufi (2012:100) mengelompokan belanja daerah menjadi 4, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Transfer.

Menurut Abdul Hafidz Tanjung (2014:386), pembiayaan adalah pos keuangan yang berfungsi untuk menutupi defisit anggaran jika anggaran pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja atau menggunakan surplus anggaran jika anggaran pendapatan lebih besar dibandingkan anggaran belanja. Pembiayaan dikelompokan menjadi 3, yaitu : Surplus/Desfisit dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis, dan tinjauan penelitian terdahulu, maka peneliti membuat kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana anatar variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah:

Beberapa definisi operasional yang akan dibahas atau dianalisis dalam penelitian ini, agar ada batasan atau ruang lingkup yang dibahas lebih terarah sehingga sesuai dengan judul yang diberikan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan.

## 2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal dapat diukur dengan :

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

## 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lainlain pendapatan asli daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SILPA dapat diukur dengan :

$$\text{SILPA} = \text{Surplus/Defisit} + \text{Pembiayaan}$$

$$\text{Neto Surplus/Defisit} = \text{Jumlah Pendapatan Daerah} - \text{Jumlah Belanja Daerah}$$

$$\text{Pembiayaan Neto} = \text{Jumlah Penerimaan Pembiayaan} - \text{Jumlah Pengeluaran Pembiayaan}$$

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Tempat di lakukan penelitian ini adalah di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Jl.Pinang Baris No. 114 C, Lalang, Medan Sunggal, Kota Medan.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai Maret 2018. Kegiatan dan waktu penenlitan disajikan di tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2018																			
		Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■																		
2.	Kunjungan Ke Dinas		■	■	■																
3.	Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■											
4.	Seminar Proposal										■	■									
5.	Pengumpulan Data														■	■					
6.	Penulisan Skripsi															■	■	■	■		
7.	Bimbingan Laporan															■	■	■	■		
8.	Sidang Meja Hijau																			■	■

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Berdasarkan simbol-simbol angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum didalam suatu parameter dan nilai data tersebut berubah-ubah atau bersifat variatif. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2012-2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data tertulis seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dimana penulis melakukan penelitian langsung di objek penelitian dengan mengambil data berupa Laporan Realisasi Anggaran dan juga didukung dengan literatur-literatur yang relevan dengan variabel-variabel yang akan diteliti.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara adalah metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis data dalam penelitian dengan kisi-kisi sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Kisi-kisi Wawancara**

No	Pertanyaan	No Item	
1.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
	1. Bagian LRA	1	
2.	Belanja Modal	2. Anggaran dan Realisasi	2
		1. Kegunaan Belanja Modal	3,4,5
		2. Faktor Belanja Modal	5,6
		3. Dampak Belanja Modal	7
3.	SILPA	1. Faktor SILPA	8,9,10
		2. Dampak SILPA	11

2. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi perusahaan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui kinerja belanja pemerintah daerah yaitu :

1. Analisis Varians Belanja

Varians belanja merupakan selisih antara realisasi belanja dengan belanja yang dianggarkan, Yaitu:

$$\text{Varians Belanja} = \text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja}$$

2. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Analisis belanja modal terhadap total belanja daerah merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

$$\frac{\textit{Total Belanja Modal}}{\textit{Total Belanja}} \times 100\%$$

### 3. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan merupakan perbandingan antara SILPA dari tahun ketahun, Semakin besar SILPA menunjukkan indikator kurang tepatnya penyajian suatu anggaran.

### 4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

$$\frac{\textit{Anggaran Belanja}}{\textit{Realisasi Belanja}} \times 100\%$$



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Penelitian dalam penulisan skripsi ini pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yang berlokasi di Jl.Pinang Baris No. 114 C, Lalang, Medan Sunggal, Kota Medan dimana Dinas Pekerjaan Umum ini bertugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum. Dalam penulisan ini penulis mendapatkan keterangan mengenai gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum, struktur organisasi dan dijelaskan pula hasil dari penelitian dengan data-data yang telah terpilih.

#### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

Sejarah Dinas Pekerjaan Umum tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa dan tatanan politik yang berkembang sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Sejak berdirinya Pemerintahan Republik Indonesia sampai sekarang, kementerian atau departemen disertai tugas untuk menangani masalah perencanaan pembangunan infrastruktur menuju daerah -daerah terpencil dengan memperhatikan aksesibilitas daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KEP/150/A/KPTS/1966, maka pada tanggal 3 Desember 1966 ditetapkan sebagai Hari Kebaktiaan Pekerjaan Umum atau lebih dikenal dengan Hari Bakti. Pembangunan daerah pada periode awal dimana disebutkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

## 2. Deskripsi Data

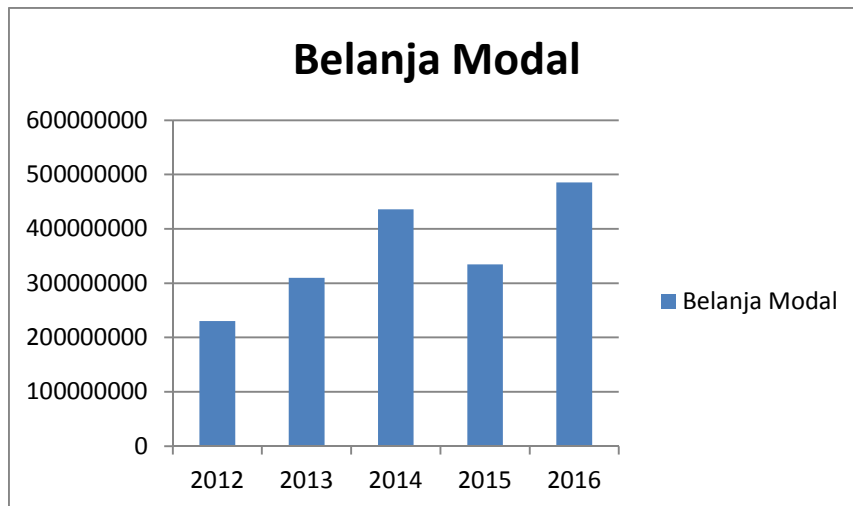
### a. Data Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan untuk investai permanen, aset tetap, dan aset berwujud lainnya dalam menunjang kegiatan pemerintah dan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Belanja Modal yang digunakan adalah Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Berikut ini data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan**  
**Tahun 2012-2016**

No	Tahun	Pendapatan		Belanja Modal		SILPA	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2012	340.000	170.001	330.972.717	230.450.457	(419.106.515)	(306.961.459)
2	2013	631.215	517.205	332.010.723	309.652.200	(448.550.666)	(424.209.830)
3	2014	375.000	379.150	527.838.750	436.150.251	(670.066,074)	(559.652.230)
4	2015	486.000	344.100	468.350.835	334.567.142	(617.543.804)	(465.776.650)
5	2016	500.000	500.450	623.351.110	485.582.448	(765.795.593)	(599.056.998)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan



**Gambar 4.1**  
**Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan**  
**Tahun 2012-2016**

Dari gambar 4.1 terlihat bahwa Belanja Modal pada Tahun 2015 di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan mengalami penurunan. Hal ini karena adanya proyek yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan pada tahun depan.

Berikut hasil wawancara pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, adapun faktor-faktor yang menyebabkan proyek belum dilaksanakan :

1. Terdapat faktor alam.
2. Tidak adanya material.
3. Kurangnya sumber daya.
4. Tidak cukup biaya
5. Terjadinya banyak konflik
6. Waktu yang diberikan tidak cukup
7. Tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

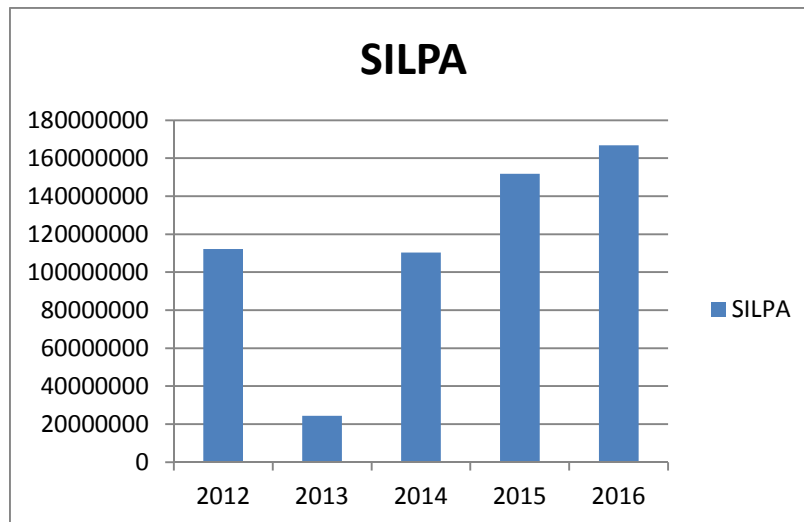
**b. Data Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

SILPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan, SILPA merupakan sumber penerimaan internal pemda yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Bentuk penggunaan SILPA ada dua, yakni : untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya (luncuran) dan membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni. SILPA yang digunakan adalah SILPA dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Berikut ini data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan**  
**Tahun 2012-2016**

No	Tahun	Pendapatan		Belanja Modal		SILPA	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2012	340.000	170.001	330.972.717	230.450.457	(419.106.515)	(306.961.459)
2	2013	631.215	517.205	332.010.723	309.652.200	(448.550.666)	(424.209.830)
3	2014	375.000	379.150	527.838.750	436.150.251	(670.066,074)	(559.652.230)
4	2015	486.000	344.100	468.350.835	334.567.142	(617.543.804)	(465.776.650)
5	2016	500.000	500.450	623.351.110	485.582.448	(765.795.593)	(599.056.998)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan



**Gambar 4.2**  
**SILPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan**  
**Tahun 2012-2016**

Dari gambar 4.2 terlihat bahwa terlihat bahwa SILPA semakin besar dari tahun 2013-2016. Semakin besar SILPA yang diperoleh dari suatu anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya penyajian suatu rencana anggaran (Anastasia Friska Palilingan, 2015:24).

Menurut hasil wawancara dari salah satu pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan kurang tepatnya penyajian suatu rencana anggaran disebabkan faktor-faktor berikut ini :

1. Faktor Intern

Yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan/entitas pemerintahan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara yaitu realisasi anggaran tahun-tahun lalu, kebijakan perusahaan/pemerintah itu sendiri, modal kerja yang dimiliki perusahaan/pemerintahan, fasilitas yang dimiliki perusahaan/pemerintah.

## 2. Faktor Ekstern

Yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat diluar perusahaan/instansi pemerintah tersebut tetapi berpengaruh terhadap perusahaan/instansi pemerintah. Faktor-faktor tersebut yaitu, keadaan pesaing, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, berbagai kebijakan pemerintah pusat, keadaan perekonomian nasional dan internasional, dan keadaan politik nasional dan internasional.

## 3. Analisis Data

### a. Analisis Varians Belanja

Analisis Varian Belanja digunakan untuk mengukur perbedaan antara belanja yang dianggarkan dan realisasi belanja yang telah dimanfaatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Analisis Varian Belanja diukur dengan melihat selisih antara pemanfaatan belanja secara realisasi dengan belanja yang dianggarkan. Semakin kecil selisih antara anggaran dan realisasi belanja maka pemerintah pada umumnya telah memanfaatkan APBD khususnya Belanja Daerah dengan baik. Berdasarkan data yang berkaitan dengan Anggaran Belanja dan Realisasinya tersebut, maka dapat dihitung Varian Belanja selama 5 tahun berikut ini :

**Tabel 4.3**  
**Analisis Varians Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan**  
**Tahun 2012-2016**

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Varian Belanja (Rp)
2012	422.506.515.000	308.663.461.925	113.673.055.007
2013	449.181.881.000	424.727.033.725	64.340.835.575
2014	670.441.074.816	560.031.380.837	110.413.843.979
2015	618.029.804.561	466.120.750.802	151.767.153.759
2016	766.295.593.440	559.557.448.848	166.738.594.592

Tahun anggaran 2012 menunjukkan anggaran sebesar Rp.422.166.515.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp.308.493.459.993 sehingga ini menimbulkan selisih sebesar Rp.113.673.055.007 yang tidak terealisasi dari total APBD. Jumlah anggaran yang tidak terealisasi dilihat dari presentasinya cukup besar dan nominalnya yang cukup signifikan. Dalam melakukan analisis varians anggaran, hendaknya memperhatikan penghematan yang dilakukan berdasarkan angka presentasi, tetapi juga jumlah nominalnya.

Untuk tahun anggaran 2013, selisih anggaran belanja dan realisasinya menunjukkan adanya efisiensi atau penghematan belanja sebesar Rp.64.340.835.575 dari total APBD. Dengan demikian untuk tahun anggaran 2013 kinerja belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dinilai baik. Namun Pada tahun anggaran 2014, 2015, 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan menunjukkan kinerja yang kurang baik. Dimana jumlah anggaran yang tidak terealisasi dilihat dari presentasinya cukup besar dan nominalnya yang cukup signifikan, selisih anggaran belanja dengan realisasi pada tahun 2014 sebesar Rp.110.413.843.979 tahun 2015 sebesar Rp. 151.767.153.759 dan 2016 sebesar Rp.166.738.594.592

### **b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah**

Analisis belanja modal terhadap total belanja daerah merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja. Norma penilaian menyatakan apabila hasil pengukuran lebih dari 50%, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/infrastruktur yang membawa kearah perkembangan pembangunan daerah yang lebih baik. Semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan rasio ini, dapat diketahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal yang disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Analisis Total Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah**  
**Tahun Anggaran 2012-2016**

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja
2012	230.450.457.400	308.663.461.925	74,66%
2013	309.652.200.230	424.727.033.725	72,91%
2014	436.150.251.016	560.031.380.837	77,87%
2015	334.567.142.493	466.120.750.802	71,77%
2016	485.582.448.144	559.557.448.848	86,77%

Analisis belanja modal terhadap total belanja daerah dari tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016 yaitu untuk tahun 2012 sebesar 74,66%, tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 72,91% selanjutnya tahun 2014 mengalami



kenaikan berkisar 5% menjadi 77,87% selanjutnya tahun 2015 mengalami penurunan berkisar 6% menjadi 71,77% dan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 14% menjadi 86,77%. Dengan demikian terlihat bahwa dengan besaran total belanja modal berbanding lurus dengan total belanja daerah.

### c. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan perbandingan antara sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dari tahun ketahun, semakin besar SILPA menunjukkan indikator kurang tepatnya penyajian suatu anggaran. SILPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

**Tabel 4.5**  
**Analisis Pembiayaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan**  
**Tahun 2012-2016**

Tahun	SILPA	Naik/Turun
2012	113.673.055.007	-
2013	24.340.835.575	Turun
2014	110413843979	Naik
2015	151767153759	Naik
2016	166738594592	Naik

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut di atas menunjukkan bahwa SILPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan pada tahun 2013 terjadi penurunan. Penurunan SILPA ini menjadi indikasi bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan telah tepat dalam penyajian APBD.

Namun pada tahun 2014 sampai 2016 semakin besar. Hal ini dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan kurang tepat menyajikan suatu rencana APBD.

#### **d. Rasio Efisiensi Belanja**

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Madiasmo (2013) menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria efisiensi belanja sebagai berikut :

<b>Presentase Kinerja Keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
Lebih dari 100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup efisien
60-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan rasio efisiensi belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016.

**Tabel 4.6**  
**Rasio Efisiensi Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan**  
**Tahun 2012-2016**

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi Belanja (%)
2012	422.506.515.000	308.663.461.925	136,8
2013	449.181.881.000	424.727.033.725	105,7
2014	670.441.074.816	560.031.380.837	119,7
2015	618.029.804.561	466.120.750.802	132,5
2016	766.295.593.440	559.557.448.848	136,9

Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja, maka dapat dilihat mulai dari tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dapat melakukan penghematan anggaran hanya di tahun 2013. Dari tahun 2014 sampai 2016 persentase rasio semakin tinggi berkisar 10% termasuk kategori tidak baik.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penurunan Belanja Modal Pada tahun 2015**

Hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yang mengacu pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2012-2016 menggunakan analisis varians belanja menunjukkan angka yang positif dimana pada Tahun anggaran 2012 terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp.113.673.055.007, tahun anggaran 2013 selisih anggaran belanja dan realisasinya menurun sebesar Rp.64.340.835.575, jika selisih antara anggaran dan realisasi belanja semakin kecil maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan telah memanfaatkan APBD

khususnya Belanja Daerah dengan baik, dan pada tahun 2014,2015,2016 selisih anggaran belanja naik yaitu tahun 2014 sebesar Rp.110.413.843.979 tahun 2015 sebesar Rp. 151.767.153.759 dan 2016 sebesar Rp.166.738.594.592, jika selisih antara anggaran dan realisasi semakin besar maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan belum memanfaatkan APBD khususnya dalam Belanja Daerah. Namun dari tahun 2012-2016 realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan.

Hasil Analisis belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan bahwa belanja modal dan belanja mengalami naik turun setiap tahunnya yaitu untuk tahun 2012 sebesar 74,66%, tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 72,91% , ini menunjukkan pengaruh tidak baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya tahun 2014 mengalami kenaikan berkisar 5% menjadi 77,87 ini menunjukkan pengaruh baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya tahun 2015 mengalami penurunan berkisar 6% menjadi 71,77% ini menunjukkan pengaruh tidak baik terhadap pertumbuhan ekonomi dan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 14% menjadi 86,77% ini menunjukkan pengaruh baik terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ratio belanja modal dan belanja Dinas Pekerjaan Umum kota medan lebih dari 50%. Maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan banyak menggunakan realisasi anggaran untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/infrastruktur yang membawa kearah perkembangan pembangunan daerah yang lebih baik.

2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) semakin besar setiap tahun

Hasil analisis pembiayaan menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terlihat dari SILPA yang semakin kecil maksudnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan telah tepat dalam penyajian APBD . Namun pada tahun 2014 sampai 2016 SILPA semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan kurang tepat menyajikan suatu rencana APBD.

Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja menunjukkan rasio lebih dari 100%, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 rasio yang lebih dari 100% dikatakan kriteria efisiensi belanja yang tidak efisien. Maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dapat dikatakan kriteria efisiensi belanja yang tidak efisien karena rasionya lebih dari 100%. Namun dari tahun 2012 sampai 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dapat melakukan penghematan anggaran hanya di tahun 2013 sekitar 30%.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari penyajian dan analisis yang telah penulis paparkan dan berdasarkan realita yang ada, maka akhir dari pembahasan penulisan skripsi ini penulis akan menyajikan beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penyajian data yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis varians belanja pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2012-2016 dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan belum memanfaatkan APBD khususnya dalam Belanja Daerah. Namun dari tahun 2012-2016 realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan.
2. Analisis belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan banyak menggunakan realisasi anggaran untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/infrastruktur yang membawa kearah perkembangan pembangunan daerah yang lebih baik.
3. Analisis pembiayaan secara umum kurang baik terlihat dari SILPA yang semakin besar dari tahun 2014-2016 yang berarti Dinas Pekerjaan Umum

Kota Medan kurang tepat dalam penyajian suatu rencana APBD, kecuali untuk tahun 2013.

4. Berdasarkan rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dikatakan kriteria efisiensi belanja yang tidak efisien karena rasionya lebih dari 100%.

## **B. Saran**

1. Untuk kinerja belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, setiap unsur yang terlibat harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian internal dari masing-masing unsur dapat berjalan baik, efektif dan efisien.
2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan harus mempertahankan kinerja belanja yang sudah baik karena realisasinya tidak ada yang melebihi dari yang di anggarankan, dengan memperhatikan anggaran dan realisasinya.
3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan harus lebih tepat dalam penyajian suatu rencana APBD agar SILPA setiap tahun tidak semakin besar.
4. Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan harus semakin memperhatikan kinerja dalam pengelolaan belanja daerah dari APBD yang diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim,dkk (2012). Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Yogyakarta
- Abdul, Halim,dkk (2011). Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Fiona, Liza (2016). “Analisis KAPasitas Fiskal dan Pengaruh Terhadap Anggaran Belanja Modal PAda Pemerintahan Daerah Di Sumatera”. *Jurnal Akuntansi Universitas Riau*, Volume XXI, No. 02, Juli 2016
- Febriana, Imas Sherli (2016). “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur”. *Jurnal Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*, Vol. 4 No. 9 hal 5
- Liando, Grace Yunita (2016). “Analisis Kinerja Belanja Dalam LAporan Realisasi ANggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe”. *Jurnal Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol.4 No.1 Maret 2016
- Makka, Harry. “Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu”. *Jurnal EMBA*, <http://www.unsrat.ac.id> . Diakses tanggl 22 Januari 2018. Hal. 332-333.
- Palilingan, Anastasia (2015). “Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Kota Manado”. *Jurnal Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol.3 No.1 Maret 2015.
- Panji, I Putu Ngurah (2014). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi”. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Bali*
- Pemerintah Republik Indonesia (2010) “Peraturan Pemerintah Nomor 71” *Standart Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)  
Diakses 22 Januari 2018
- Pemerintah Republik Indonesia (2011) “Kementrian Keuangan Republik Indonesia” *Deskripsi dan Analisis Anggaran* . Jakarta. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) Diakses 5 Maret 2018



- Pemerintah Republik Indonesia (1996) “Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327” *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta.  
[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id) Diakses 7 Maret 2018
- Sukmawati, Resiana (2016). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal PADA Pemerintahan Daerah Kabupaten”. *Jurnal Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.4 No.1 Maret 2016
- Sherli, Imas Febriana (2015) “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur” *Jurnal Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*, Vol. 4 No. 9 (2015)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : Suryani Fajrin  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Morawa/10 September 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Dusun 1 Desa Dagang Kelambir, Tg.Morawa  
Anak ke : 4 dari 4 bersaudara

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Alm.Saiful Irwan  
Ibu : Mila Sari  
Alamat : Dusun 1 Desa Dagang Kelambir, Tg.Morawa

### **Pendidikan Formal**

1. SD Negeri 104236 Tanjung Morawa Tahun 2008
2. Mts. Al-Jam'iyatul Washliyah Tanjung Morawa Tahun 2011
3. SMA Negeri 1 Lubuk Pakam Tahun 2014
4. Tahun 2014-2018, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

**SURYANI FAJRIN**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suryani Fajrin  
NPM : 1405170707  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS BELANJA MODAL DAN SISA LEBIH  
PEMBIAYAA ANGGARAN (SILPA) DALAM  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA  
MEDAN

Menyatakan bahwa penelitian skripsi ini benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan



SURYANI FAJRIN

## Lembaran Wawancara

### **ANALISIS BELANJA MODAL DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN**

Objek Wawancara	Analisis Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Tempat Wawancara	Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Jl.Pinang Baris No. 114 C, Lalang, Medan Sunggal, Kota Medan
Nama Mahasiswa	Suryani Fajrin
Nama Pegawai	
Jabatan	
Waktu Wawancara Dilakukan	Maret 2018

No	Analisis Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Jawaban Responden
1	Apakah saja bagian LRA di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.	Bagian LRA secara singkat yaitu, PAD, belanja operasi, belanja modal, surplus/defisit, SILPA
2	Apakah realisasi melebihi atau tidak melebihi anggaran setiap tahunnya?	Tidak, realisasi tidak pernah melebihi anggaran setiap tahunnya
3.	Apakah Belanja Modal setiap tahunnya meningkat?	Tidak setiap tahun belanja Modal meningkat.
4.	Apakah Belanja Modal bisa menurun?	Ya benar, belanja modal bias menurun

5.	Apakah penyebab Belanja Modal Menurun?	Penyebab belanja modal menurun salah satunya adanya proyek yang belum diselesaikan dan akan di selesaikan tahun depan.
6.	Apa faktor menurunnya Belanja Modal?	Faktornya yaitu terdapat faktor alam, tidak adanya material, kurangnya sumber daya, tidak cukup biaya, terjadinya banyak konflik, waktu yang diberikan tidak cukup, tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
7.	Apa dampaknya jika Belanja Modal Menurun?	Dampaknya yaitu kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan akan dinilai tidak baik dalam .
8.	Apakah bagus jika SILPA semakin besar setiap tahunnya?	Tidak, SILPA tidak bagus jika semakin besar setiap tahunnya.
9.	Apakah bagus jika SILPA semakin besar setiap tahunnya?	Tidak, SILPA tidak bagus jika semakin besar setiap tahunnya.
10.	Apa faktor semakin besarnya SILPA?	Ada dua faktor, yaitu faktor intern dan ekstern
11.	Apa dampaknya jika SILPA semakin besar?	Dampaknya yaitu kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan akan dinilai kurang baik.



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

201:

Kepada Yth.  
Bapak Dekan  
Fakultas Ekonomi  
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : 

S	U	R	Y	A	N	I	F	A	J	R	I	N						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

NPM : 

1	4	0	5	1	7	0	7	0	7									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat/Tgl. Lahir : 

T	A	N	J	U	N	G	M	O	R	A	W	A						
1	0	S	E	P	T	E	M	B	E	R	1	9	9	6				

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : 

D	E	S	A	D	A	G	A	N	G	K	E	L	A	M	B	I	R	
T	A	N	J	U	N	G	M	O	R	A	W	A						

Tempat Penelitian : 

B	A	N	I	T	B	A	N	G	K	O	T	A	M	E	D	A	N	
C	Q	D	I	N	A	S	P	E	K	E	R	J	A	A	N			
U	M	U	M															

Alamat Peneijitan : 

J	L	P	I	N	A	N	G	B	A	R	I	S						
N	O	1	4	C														

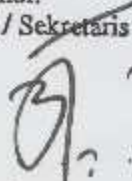
Memohon kepada Bapak untuk pembuatan Izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:


1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Diketahui:  
Ketua Jurusan / Sekretaris

  
30/11.2017  
(FITRIANI SARAGIH SENGUL)

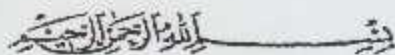
Wassalam  
Pemohon

  
(SURYANI FAJRIN)

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

Medan..... H  
M

Kepada Yth,  
Ketua Jurusan  
Fakultas Ekonomi UMSU  
Di  
Medan



Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURYANI FAJRIN  
NPM : 1405170707  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Kelas/Semester : VII (TUJUH)

Merencanakan pengajuan judul untuk pembuatan SKRIPSI yaitu :

1. Analisis pengaruh pemberlakuan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pada dinas pemerintahan kota Medan
2. Analisis pengendalian akuntansi perencanaan dan pengeluaran kas pada dinas pemerintahan kota Medan

*Handwritten notes:* Acc. 12/3/15

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu:

Nama Pembimbing: *Etzar Srambela, SE, Mdi 19/2/2015*

Dari hasil survey & kunjungan ke perusahaan/tempat penelitian serta proses pembimbing dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan Belanja Modal pada Tahun 2015 di Dinas Pekerjaan Umum
2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLIPA) setiap tahun semakin besar
3. ....

Dengan demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah:

ANALISIS BELANJA MODAL DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLIPA) DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN

*Handwritten signature and date:* 12/3/15

Nomor Agenda : 453

Ketua/ Sekretaris Jurusan

*Signature: Etzar Srambela*  
(FITRIANI SRAGAH, SE, M.Si)

Pemohon

*Signature: Suryani Fajrin*  
(SURYANI FAJRIN)

Diketahui Oleh Pembimbing

*Signature: Etzar Srambela*  
(Etzar Srambela, SE, M.Si)

Catatan:

1. Proposal Penelitian harus diAgendakan paling lama 1 (Satu) bulan setelah di Paraf oleh program studi
2. Seminar Proposal Paling lama 1 (Satu) bulan setelah judul di Agendakan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : SURYANI FAJRIN  
N.P.M : 1405170707  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Judul Proposal : ANALISIS BELANJA MODAL DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN  
ANGGARAN (SILPA) DALAM LAPORAN REALISASI  
ANGGARAN (LRA) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA  
MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
	- Perbaiki sistematisa penulisan	[Signature]	
	- Pastikan arah penelitian → asosiatif atau deskriptif		
	- Bab I - LBM diperbaiki	[Signature]	
	- Masalah penulisan		
	- Tabulasi data		
	- Teori pendahuluan		
	- Identifikasi masalah		
	- Rumusan & tujuan		
	- Perbaiki dahulu sistematisa penulisan	[Signature]	
	Lihat pedoman		
	- Pastikan arah penelitian		
	- Masalah penulisan penelitian		
	- Identifikasi masalah		
	- Rumusan masalah		

Pembimbing Proposal

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Medan, Januari 2018  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : SURYANI FAJRIN  
N.P.M : 1405170707  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Judul Proposal : ANALISIS BELANJA MODAL DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
	Perjelas Masalah penelitian.		
	Bab I : - Latar belakang masalah - Rumusan masalah - Tujuan penelitian		
	Bab II : - Teori pendukung - Contoh dan variabel - Hipotesis		20/1/18
	Bab III : - Perbaiki Metodologi Penelitian - Masalah penelitiannya lebih jelas - Teori pendukung lebih detail		27/1/18
	- Perbaiki Rumusan Masalah - Perbaiki teori pendukung - Definisi operasional - Daftar pustaka - Daftar persan		10/2/18

Ace & Sumatra 20/1/18

Pembimbing Proposal

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Medan, Januari 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6824567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari KAMIS, 22 Februari 2018 menerangkan bahwa:

Nama : SURYANI FAJRIN  
N.P.M. : 1405170707  
Tempat / Tgl.Lahir : TJ.MORAWA, 10 SEPTEMBER 1996  
Alamat Rumah : DSN I DESA DAYANG KELAMBIR, TJG MORAWA  
JudulProposal : ANALISIS BELANJA MODAL DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DALAM LAOPRAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Elizar Sinambela, SE, M.Si* *13-2018*

Medan, 22 Februari 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.SI

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.SI

Pembimbing

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.SI

Pembanding

DR.EKA NURMALA SARI, SE, M.SI

Diketahui / Disetujui  
Dekan

H.JANURI, SE, MM. M.SI



**BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI**

Pada hari ini **KAMIS, 22 Februari 2018** telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

**N a m a** : SURYANI FAJRIN  
**N . P . M .** : 1405170707  
**Tempat / Tgl.Lahir** : TJ.MORAWA, 10 SEPTEMBER 1996  
**Alamat Rumah** : DSN I DESA DAYANG KELAMBIR, TJG MORAWA  
**JudulProposal** : ANALISIS BELANJA MODAL DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DALAM LAOPRAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
<i>Judul</i>	
Bab I	latar belakang masalah. btm sempurna - Ditanyakan teori tujuan penelitian
Bab II	teori icerangka berakir
Bab III	Waktu penelitian teknik pengumpulan data teknik analisis data
Lainnya	Daftar Pustaka
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor Seminar Ulang

Medan, 22 Februari 2018

**TIM SEMINAR**

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Pemanding

DR.EKA NURMALA SARI, SE, M.Si



Unggul, Cerdas & Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 3014 /II.3-AU/UMSU-05/ C / 2017 Medan, 11 Rabiul Awal 1439 H  
Lampiran : - 30 November 2017M  
Perihal : IZIN RISET

Kepada : Yth. Bapak / Ibu Pimpinan :  
BALITBANG KOTA MEDAN  
Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM MEDAN  
Jln. Kapt. Maulana Lubis No. 2 Medan  
Di -  
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi Untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : SURYANI FAJRIN  
NPM : 1405170707  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Akuntansi

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan ✓



H. JANIR SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Cerdas & Terpercaya

Wab surat ini agar disebutkan tanggalnya

Nomor : 1532/II.3-AU/UMSU-05/F/2018  
 Lamp. : -  
 Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 21 Djumadil Akhir 1439 H  
 09 Maret 2018 M

Kepada :

Yth, Bapak / Ibu Pimpinan  
**DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN**  
 di  
 Tempat.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : SURYANI FAJRIN  
 N P M : 1405170707  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : ANALISIS BELANJA MODAL DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan



H. NURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : [balitbang@pemkomedan.go.id](mailto:balitbang@pemkomedan.go.id) Website : [balitbang.pemkomedan.go.id](http://balitbang.pemkomedan.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

No : 070/467 /Balitbang/2018

1. Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/1528/Balitbang/2017 Tanggal: 7 Desember 2017, dengan ini memberikan keterangan kepada nama dibawah ini :

Nama : Suryani Fajrin.  
NPM : 1405170707.  
Jurusan : Akuntansi.  
Lokasi Penelitian : Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.  
Lamanya : 3 (tiga) bulan  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan Penelitian di Pemerintah Kota Medan dan telah menyerahkan 1 (satu) set soft copy hasil penelitian.

2. Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan.

Pada Tanggal : 24 Maret 2018

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA MEDAN,



ERASUTAN, M. Pd

EMBIYA TK. I

0591114 198403 1.002

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU.
3. Yang bersangkutan.
4. Bertinggal.



*Unggul, Cerdas & Terpercaya*

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL  
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

**NOMOR : 1553 / TGS / IL.3-AU / UMSU-05 / F / 2018**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,  
berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan AKUNTANSI, Tanggal 27 FEBRUARI 2018  
Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : SURYANI FAJRIN  
N P M : 1405170707  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS BELANJA MODAL DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN  
ANGGARAN (SILPA) DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN  
Pembimbing : ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 09 MARET 2019

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : MEDAN  
Pada Tanggal : 21 Djumadil Akhir 1439 H  
09 Maret 2018 M

Dekan ✓



IL. NURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SURYANI FAJRIN  
NPM : 1405170707  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Judul Penelitian : ANALISIS BELANJA MODAL DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Bab I: <del>Sistem</del> Bab II: <del>Kemampuan</del> Bab III: <del>Definisi</del> - <del>jenis &amp; sub</del> - <del>metode</del> - <del>teknik</del>		28/3/18
	Bab IV: <del>Teknik</del> Bab V: <del>Kerangka</del> Bab VI: <del>Definisi</del> - <del>jenis &amp; sub</del> - <del>teknik</del>		20/3/18
	Bab VII: <del>Hand</del> Bab VIII: <del>Pembahasan</del> Bab IX: <del>Kesimpulan</del>		22/3/18

Medan, Maret 2018

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : SURYANI FAJRIN  
NPM : 1405170707  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Judul Penelitian : ANALISIS BELANJA MODAL DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Perbaiki kembali Pembahasan	/	23/3-18
	Perbaiki Absorbe dan penyusunan isi skripsi		
	Selesaikan Banting, Acc dan uji p & hasil yang terjawab	/	23/3-18

Pembimbing Skripsi

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Medan, Maret 2018

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)